

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Pemilu kepala daerah (Pemilukada) yang memilih Bupati dan Wakil bupati merupakan salah satu bagian dari mekanisme demokrasi, menjadi gerbang utama dalam membangun kepemimpinan di daerah. Melalui pemilukada ini rakyat memiliki peranan sangat penting, dimana rakyatlah yang akan menentukan siapa nantinya yang akan terpilih menjadi seorang Bupati dan Wakil Bupati yang akan memimpin daerahnya selama lima tahun mendatang.

Keterlibatan Kabupaten Bantul pada pemilukada serentak periode pertama di tahun 2015 dilandaskan dengan Undang-Undang no 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul pada tanggal 9 Desember 2015.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang telah berhasil melaksanakan pemilukada serentak pertama di Indonesia, pemilukada ini dilaksanakan karena masa jabatan

Bupati dan Wakil Bupati pada periode sebelumnya sudah berakhir sejak 27 Juli 2014. Pemilukada di Kabupaten Bantul diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Suharsono-Abdul Halim Muslih (Suharsono-Halim) yang diusung oleh koalisi PKB, Partai Gerindra, serta di dukung oleh partai PKS dan Partai Demokrat, pasangan ini mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati ke KPU Kabupaten Bantul pada tanggal 28 Juli 2015.

Pasangan calon lainnya yang ikut berpartisipasi dalam pemilukada merupakan pasangan petahana (*incumbent*) yakni Sri Suryawidati-Misbakhul Munir (Ida-Munir), pasangan ini resmi mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Bantul untuk menjadi kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 26 Juli 2015, dimana koalisi ini diusung oleh koalisi PDI-P, Nasdem serta didukung oleh partai Golkar dan PPP.

**Gambar 5.1. Foto Kandidat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati**



Pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Bantul ini tidak terlepas dari isu yang beredar, dimana pasangan Suharsono-Halim awalnya dianggap sebagai pasangan boneka yang sengaja dibentuk oleh pihak lawan yakni Ida-Munir. Hal ini terjadi karena pada awalnya Suharsono merupakan salah satu kader dari PDIP yang dipersiapkan untuk menjadi wakil Ida pada pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015 melalui sistem penjaringan.

Keinginan PDIP yang kuat untuk menjadikan Suharsono sebagai wakil Ida tersebut langsung diberikan respon penolakan olehnya, Suharsono beranggapan bahwa ia memiliki kredibilitas sendiri dan bisa menjadi seorang pemimpin bukan hanya sekedar sebagai wakil. Sikap

selanjutnya yang diambil oleh Suharsono ialah keluar meninggalkan PDIP dan memilih untuk menjadi calon bupati dengan mendekati Partai Gerindra untuk membantunya dalam pemilukada.

Sikap Suharsono yang mendekati Partai Gerindra tidak langsung diterima serta-merta oleh Nur Subiyantoro selaku ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bantul, mereka mempertimbangkan terlebih dulu tujuan yang dimiliki dan hal apa yang menjadi dasar Suharsono untuk mencalonkan dirinya sebagai seorang Calon Bupati dalam pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015.

Setelah adanya pertimbangan yang cukup matang, akhirnya pihak Partai Gerindra menerima Suharsono untuk menjadi Calon Bupati dan bersedia menjadi partai pengusung dalam pemilukada tahun 2015 di Kabupaten Bantul, sikap Gerindra tersebut baru disampaikan menjelang masa pendaftaran bupati dan wakil bupati hampir usai. Nur Subiyantoro menyampaikan pihaknya mengambil keputusan tersebut berdasarkan surat rekomendasi dari Dewan Pengurus

Pusat (DPP) Partai Gerindra yang baru diterbitkan pada hari senin pagi tanggal 27 juli 2015. Kondisi ini dipertegas dengan adanya argument yang disampaikan oleh nya saat diwawancarai oleh sebuah media, yakni :

“Surat rekomendasi dari DPP untuk mendukung Suharsono menjadi Bupati dalam pemilukada Kabupaten Bantul itu datangnya bersamaan dengan surat keputusan pergantian kepengurusan dari ketua lama yakni Purwanto kepada saya”

Pendapat tersebut ia sampaikan usai mengantarkan berkas pendaftaran ke KPU Bantul, ia menyatakan bahwa surat rekomendasi dan keputusan pergantian dari kepengurusan tersebut asli dan langsung ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Gerindra yakni Prabowo Subianto. Nur berani menjamin surat yang sudah terbit tersebut dapat di pertanggungjawabkan olehnya, hal ini dikarenakan untuk urusan besar seperti ini pihaknya tidak mau bermain-main.

Dalam proses penentuan calon wakil bupati untuk menemani Suharsono maju dalam pemilukada, Partai Gerindra memberikan kewenangan kepada Suharsono untuk menentukan sendiri siapa yang nantinya akan menemani

dirinya sebagai wakil bupati selama 5 tahun masa kepemimpinan. Dengan berbagai pertimbangan yang cukup matang, akhirnya Suharsono menentukan yang akan mendampingi beliau sebagai calon Wakil Bupati ialah Abdul Muslih Halim, dimana saat itu Halim masih menjabat sebagai ketua DPC PKB Kabupaten Bantul.

Dengan terpilihnya Halim sebagai calon wakil bupati, maka secara otomatis PKB yang diketuai oleh dirinya memutuskan untuk bergabung bersama Gerindra untuk membentuk sebuah koalisi pendukung pasangan Suharsono-Halim dalam pemilukada Kabupaten bantul tahun 2015 dan mendaftarkan pasangan tersebut dihari terakhir pendaftaran.

Dari hasil pemilu yang telah dilaksanakan tersebut kemenangan diraih oleh pasangan Suharsono-Halim dengan perolehan suara 261.412 dari 495.089 suara sah atau sejumlah 52,80%. Kemenangan pasangan suharsono halim tersebut tidak terlepas dari peranan beberapa partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pasangan Suharsono-Halim.

Setiap koalisi partai politik pasti memiliki strategi yang digunakan untuk memenangkan suara dalam pemilu, selain koalisi ada pula faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemenangan koalisi Suarsono-Halim. Berikut akan dijelaskan faktor yang mempengaruhi kemenangan koalisi Suharsono-Halim dalam kemenangan dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bantul tahun 2015.

## **5.1. Faktor Kemenangan Koalisi Suharsono-Halim dalam Pemenangan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015**

### **5.1.1. Koalisi Partai Politik**

Pada pelaksanaan sebuah pemilihan umum pasangan calon pemimpin akan diusung dan didukung oleh partai politik yang tergabung dalam sebuah koalisi. Koalisi yang mengusung pasangan Suharsono-Halim terdiri dari PKB, Partai Gerindra sebagai partai pengusung dan didukung oleh PKS serta Partai Demokrat.

Koalisi partai politik yang mengusung pasangan Suharsono-Halim memiliki ideologi yang berbeda-beda,

dimana partai PKB dan PKS merupakan partai dengan Ideologi Islam (partai agamis), partai Gerindra merupakan partai dengan ideologi Nasionalis serta partai Demokrat merupakan partai dengan ideologi Nasionalis agamis. Seperti yang telah dijelaskan di awal pembahasan, pembentukan koalisi ini dibentuk atas dasar keinginan Suharsono sebagai calon Bupati untuk bersanding dengan Halim sebagai wakil bupatinya.

Evriza (2012) mengemukakan bahwa ada 4 cara yang dapat digunakan untuk membentuk sebuah koalisi yakni bermula dengan satu pendiri, mencapai masa kritis, mengajak yang paling lemah untuk mendukung, serta membentuk diam-diam dan membubarkan secepatnya. Dari keempat cara tersebut koalisi partai politik yang mengusung pasangan Suharsono-Halim menggunakan dua cara yakni mencapai masa kritis dan bermula dengan satu pendiri (*founder*), namun pada kenyataannya lebih menekankan pada cara pertama yakni bermula dengan satu pendiri (*founder*).

Masa kritis yang dimaksud ini ialah saat menjelang pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015 hampir berakhir, hanya ada satu nama yang sudah pasti mendaftarkan diri yakni Ida-Munir. Kondisi seperti ini membuat masyarakat khawatir akan ditundanya pemilukada tahun 2015, namun kekhawatiran tersebut berakhir dengan hadirnya purnawirawan Polri yakni Suharsono yang siap mencalonkan diri sebagai calon Bupati pada pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015.

Koalisi pasangan Suharsono-Halim ini bermula dengan satu pendiri (*founder*) yakni Suharsono, dimana awalnya ia mencari dukungan politik dengan mendekati Partai Gerindra untuk mengusung dirinya sebagai calon Bupati dalam pemilukada. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh partai Gerindra kepadanya secara bebas dalam penentuan wakil yang akan mendampingi, Suharsono dengan yakin dan pertimbangan yang matang menentukan Halim lah yang sesuai untuk menempati posisi

sebagai calon Wakil Bupati, serta segera membentuk koalisi dengan partai yang mengusung Halim yakni PKB.

Secara otomatis partai pendukung Halim yakni PKB akan membantu Partai Gerindra dan Suharsono dalam pemenangan pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015 guna melakukan perubahan di Bantul kearah yang lebih baik lagi. Nur Subyantoro selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bantul bersama pimpinan PKB, dan PKS, menyatakan bahwa mereka kedepannya akan tetap solid mendukung dan siap mengawal visi-misi yang diusung oleh pasangan Suharsono-Halim.

Partai Gerindra dan PKB sebagai partai pengusung ini memiliki kursi yang cukup di legislatif. Jumlah kursi yang diraih dan jumlah suara sah pada pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2014 dapat dijelaskan di tabel berikut

**Tabel 5.1. Jumlah suara sah dan perolehan kursi Pemilu legislatif kabupaten Bantul tahun 2014**

No	Partai Politik	Jumlah Suara Sah	%	Jumlah kursi	%
1	Partai NasDem	32.072	5.72	2	4.44
2	PKB	57.523	10.26	4	8.89
3	PKS	42.101	7.51	4	8.89
4	PDI Perjuangan	151.436	27.01	12	26.67
5	Partai Golkar	42.282	7.54	5	11.12
6	Partai Gerindra	75.514	13.47	6	13.33
7	Partai Demokrat	28.384	5.06	1	2.22
8	PAN	69.635	12.41	6	13.33
9	PPP	38.007	6.78	4	8.89
10	Partai Hanura	11.033	1.97	-	0
14	Partai Bulan Bintang	11.102	1.98	1	2.22
15	PKPI	1.638	0.29	-	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>560.727</b>	<b>100</b>	<b>45</b>	<b>100</b>

*Sumber : KPU Kabupaten Bantul (data diolah)*

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa partai Gerindra memperoleh suara sebesar 75.514 suara sah atau 6 kursi di legislatif, sementara PKB memperoleh suara sebesar 57.523 suara sah atau 4 kursi di legislatif. Apabila jumlah partai ini diakumulasikan, maka total perolehan kursi ialah sebesar 10 kursi di legislatif, jumlah ini sudah memenuhi standar minimum jumlah kursi legislatif.

Kondisi ini diperkuat dengan adanya aturan yang diberlakukan oleh KPU Kabupaten Bantul, yakni Peraturan KPU nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan, dimana pasangan Bupati dan wakil Bupati bisa di dukung oleh partai politik yang memiliki minimal 9 kursi di DPRD. Pernyataan ini dikemukakan langsung saat wawancara oleh M. Johan Komara (2016) yakni

“Untuk pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Bantul kami mengikuti peraturan yang sudah ada yakni Peraturan KPU (PKPU) no 9 tahun 2015 dimana minimal jumlah kursi legislatif yang di miliki partai pengusung ialah sejumlah 9 kursi. Kami juga tidak pernah menentukan berapa banyak partai yang harus digunakan pasangan calon Bupati dan Wakil bupati dalam keikut sertaan di pemilukada. Banyak atau sedikitnya jumlah partai dalam sebuah koalisi kami serahkan ke pihak pasangan, namun tetap harus memenuhi minimum 9 kursi di legislatif dan tidak boleh kurang.” (Ketua Umum KPU Kabupaten Bantul, 5 oktober 2016)

Selain keempat partai ini yang tergabung dalam koalisi pendukung pasangan Suharsono-Halim, koalisi ini di dukung partai lain yakni PAN, Partai Golkar, sebagian PAC PDIP dan PPP. Dimana partai tambahan tersebut membentuk relawan sendiri dalam upaya kemenangan

suara. PAN membentuk relawan yang dinamakan Relawan Hijau, PPP dan Partai Golkar membentuk relawan yang dinamakan Relawan Perubahan, sedangkan 14 PAC PDIP membentuk relawan yang dinamakan relawan Jas Merah.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan adanya korelasi antara teori yang digunakan, peneliti mengemukakan bahwa koalisi yang digunakan oleh pasangan Suharsono-Halim cenderung menggunakan koalisi kemenangan minimal. Kondisi ini diperkuat dengan adanya teori dari Ambardi dalam Riker (1962:33) yang menjelaskan bahwa peserta koalisi akan membentuk koalisi seminimal mungkin asal menjamin kemenangan dalam persaingan, dan tidak akan menambah peserta lagi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa peserta koalisi hanya berfokus pada suara yang dibutuhkan guna memenangkan pertarungan politik.

Berdasarkan teori Evriza (2012) yang menjelaskan bahwa partai-partai politik bergabung membentuk koalisi

dengan menghitung kemungkinan kemenangan suara terbanyak, yakni 50% + 1 suara. Dari 4 jenis koalisi yang dikemukakan oleh evriza (2012) yakni koalisi berbasis ideologi, koalisi kemenangan minimal, minimal range coalition, minimum size coalition dan bargaining proporsion, hampir keseluruhan jenis koalisi didasari oleh kesamaan ideologi, hanya beberapa saja yang tidak berdasarkan koalisi.

Korelasi antara teori koalisi partai politik dengan temuan yang di dapatkan oleh peneliti di Lapangan akan di jelaskan dalam tabel berikut :

**Tabel 5.2. Korelasi Teori Koalisi dengan Temuan**

No	Jenis Koalisi	Teori	Temuan
1	Koalisi Berbasis Ideologi	Berfokus pada pentingnya kesamaan ideologi dan kebijakan partai dalam pembentukan koalisi	Ideologi yang digunakan masing-masing partai koalisi berbeda-beda
2	Koalisi Kemenangan Minimal	Berfokus pada suara yang dibutuhkan untuk memenangkan suara dengan mencari sebanyaknya partai politik yang memperoleh kursi di kabinet.	Jumlah kursi yang diraih masing-masing partai politik dikabinet merupakan jumlah kursi yang dominan (tinggi)
3	Minimal Range Coalition	kedekatan pada kecenderungan ideologis	Ideologi yang digunakan oleh partai berbeda-beda

4	Minimum Size Coalition	Partai dengan suara terbanyak akan mencari partai yang lebih kecil untuk bergabung demi sekadar mencapai suara mayoritas.	Bukan dari partai yang suara terbanyak, suara terbanyak ada di kubu lawan yakni PDIP
5	Bargaining Proposition	Merupakan koalisi dengan jumlah anggota partai paling sedikit	Anggota partai koalisi terdiri dari 4 partai, lebih banyak dibandingkan koalisi pasangan lawan

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa koalisi yang digunakan oleh pasangan Suharsono-Halim memang cenderung berbentuk koalisi kemenangan minimal, dengan jumlah kursi yang diraih masing-masing partai politik merupakan jumlah terbanyak (dominan), yakni PKB dengan jumlah 4 kursi, Partai Gerindra dengan jumlah 6 kursi, PKS dengan jumlah 4 kursi dan Partai Demokrat dengan jumlah 1 kursi. Total perolehan kursi partai koalisi ialah 15 kursi di kabinet.

Pada awalnya koalisi pendukung pasangan Suharsono-Halim hanya menargetkan kemenangan di 10 kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul atau sejumlah 60% dari total keseluruhan. Kondisi ini disebabkan karena pihak lawan merupakan pasangan

petahana (*incumbent*) yang sangat kuat sekali, dan pasangan ini juga diusung oleh partai-partai yang memiliki total kursi terbanyak di DPRD kabupaten bantul dengan perolehan kursi di DPRD sejumlah 12 kursi untuk PDIP dan 2 kursi untuk partai Nasdem.

Setelah penghitungan suara dari pemilih terkumpul, pasangan Suharsono-Halim ini mendapatkan suara terbanyak di 15 kecamatan di Kabupaten Bantul. Kondisi ini disebabkan karena koalisi ini menggunakan metode kemenangan berbasis Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga kemenangan pasangan Suharsono-Halim bisa secara cepat di prediksi. Pernyataan sebagaimana yang dikemukakan tersebut, didasarkan pada pernyataan yang diungkapkan oleh Nur Rohmat (2016) dari partai Demokrat bahwa :

“Pada awalnya kami sangat takut untuk pasangan yang kami dukung ini tidak mendapatkan suara dan tidak mampu menyaingi pasangan petahana, tapi dengan niat merubah Bantul lebih baik kami berusaha semaksimal mungkin. Masing-masing partai menekankan kepada kader-kadernya di tingkatan Pimpinan Anak Cabang (PAC) untuk bisa mendapatkan suara yang banyak, kondisi ini kami fokuskan pada kemenangan berbasis

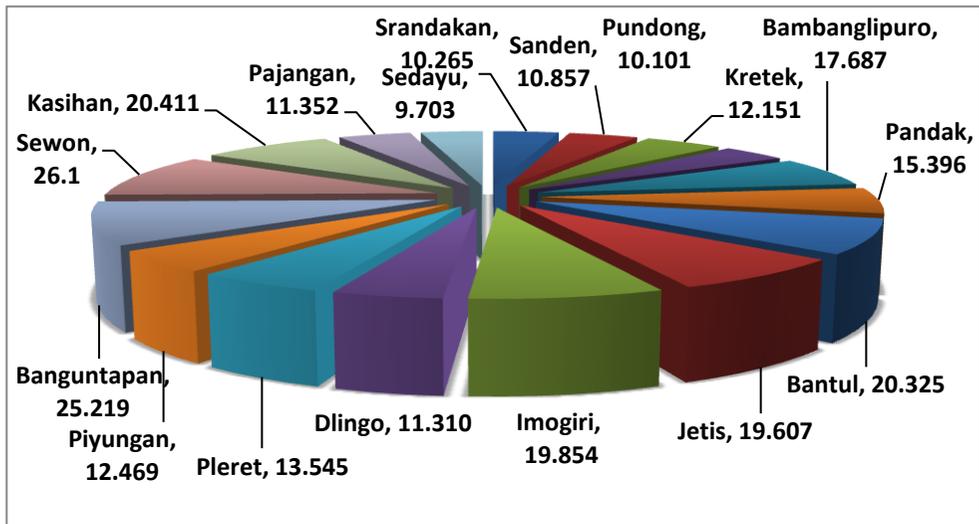
TPS yang ada di setiap kecamatan di Kabupaten Bantul.” (ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bantul, 29 November 2016)

**Gambar 5.2. Foto Hasil Perolehan Suara masing-masing nomor urut**



Perolehan suara tertinggi pasangan Suharsono-Halim berada di Kecamatan Sewon dengan perolehan suara sejumlah 26.100 suara sah. Hal ini disebabkan karena banyaknya kader-kader partai koalisi yang berdomisili di wilayah ini, tidak hanya itu di Kecamatan Sewon juga merupakan daerah basis masa Nahdatul Ulama (NU) yang merupakan organisasi dari partai PKB. Berikut grafik perolehan suara pasangan Suharsono-Halim di setiap kecamatan di Kabupaten Bantul pada pemilukada tahun 2015.

**Gambar 5.3. Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Suharsono-Halim Disetiap Kecamatan pada Pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015**



*Sumber : KPU Kabupaten Bantul*

### **5.1.2. Partisipasi Politik**

Partisipasi pemilih merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan Pemilukada di Kabupaten Bantul tahun 2015. Baik buruknya nasib pemerintahan di Bantul bergantung terhadap pilihan rakyat, apabila masyarakat Bantul memilih pemimpin yang berkualitas, kapasitas dan memiliki integritas, maka kebijakan yang akan dihasilkan mampu menjawab kebutuhan dan persoalan yang ada di masyarakat.

Begitu juga sebaliknya, apabila pemimpin yang dipilih tidak memiliki kredibilitas, tidak berkualitas, tidak memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, maka bisa dipastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak memenuhi kebutuhan dan persoalan masyarakat, serta kondisi pemerintahan di daerah tidak akan membaik dan cenderung mengarah kepada pemerintahan yang melaksanakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Bantul tahun 2015, KPU Kabupaten Bantul menargetkan presentase partisipasi pemilih sebesar 77,5%. Angka ini sudah sesuai dengan angka yang ditentukan oleh KPU RI secara nasional. Tingkat partisipasi pemilih salah satunya disebabkan oleh faktor Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih (Diklih) yang dilaksanakan oleh KPU maupun partai politik.

Pendidikan pemilih (Diklih) ini merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bantul secara sadar dan terencana dalam upaya menanamkan nilai-

nilai yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi untuk memberikan pemahaman tentang kegiatan pemilihan yang dilakukan secara periodik agar dapat memenuhi syarat sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak pilihnya dengan tepat saat pemilihan berlangsung.

Pendidikan pemilih dilaksanakan atas dasar terbatasnya kepedulian dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi, serta terbatasnya kepedulian terhadap pendidikan pemilih kepada masyarakat. Adapun yang menjadi kelompok sasaran dalam pendidikan pemilih dibagi menjadi 2 kelompok, yakni kelompok strategis antara lain pra pemilih, pemilih pemula, perempuan, kelompok marginal dan penyandang disabilitas dan agamawan.

Kelompok kedua yang menjadi sasaran ialah kelompok rentan, yang terdiri dari daerah dengan tingkat partisipasi rendah, daerah yang berpotensi melaksanakan pelanggaran pemilu dengan angka yang tinggi, serta daerah yang rawan konflik dan kekerasan. Hal ini dilaksanakan

dengan metode pemanfaatan dari segi teknologi informasi, segi media massa, lembaga pendidikan, aktivitas sosial-budaya, memobilisasi massa, serta pemasangan bahan sosialisasi atau alat peraga.

Pendidikan pemilih dilaksanakan dalam 2 bagian, bagian pertama dilaksanakan di luar tahapan pemilu dan bagian kedua dilaksanakan di dalam tahapan pemilu. Pendidikan pemilih yang dilakukan dalam tahapan pemilu disebut dengan sosialisasi. Bentuk sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU terdiri dari sosialisasi tatap muka, sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula dan penyandang disabilitas.

Selain menggunakan tatap muka, bentuk sosialisasi lainnya dilaksanakan melalui media cetak yakni Kedaulatan Rakyat dan Harian Jogja, juga melalui media elektronik seperti talkshow radio, talkshow televisi, penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) baik di radio maupun di televisi, serta penayangan di videotron maupun di website. Metode lainnya yakni dengan menggunakan sms siaran

(*broadcast*) kepada masyarakat, dan sosialisasi melalui media sosial seperti what's app, BBM serta facebook.

Bentuk sosialisasi lainnya yakni melalui pameran Bantul Expo, melalui leflet, poster, baliho, spanduk, dan stiker. Sosialisasi juga dilaksanakan melalui kesenian tradisional, pemanfaatan tradisi lokal, kunjungan ke pasar tradisional, rumah sakit dan tempat strategis lainnya, adanya mobil keliling, melalui media komunitas, senam sehat ceria, kerja sama dengan stake-holder serta kerjasama dengan perguruan tinggi.

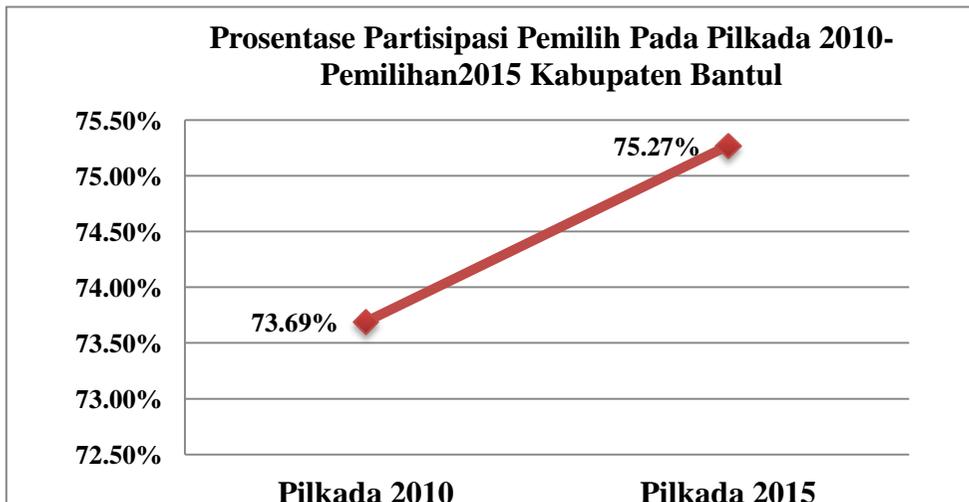
Faktor lain yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih ialah validitas data pemilih, proses kampanye, situasi politik yang berkembang. KPU yang bertugas sebagai penyelenggara hanya bisa memaksimalkan peningkatan partisipasi pemilih dengan cara sosialisasi dan pendidikan pemilih, fasilitasi kampanye serta pemutakhiran data pemilih.

Dari target yang sudah ditetapkan tersebut yakni sejumlah 77,5% dengan upaya yang sudah dilakukan secara

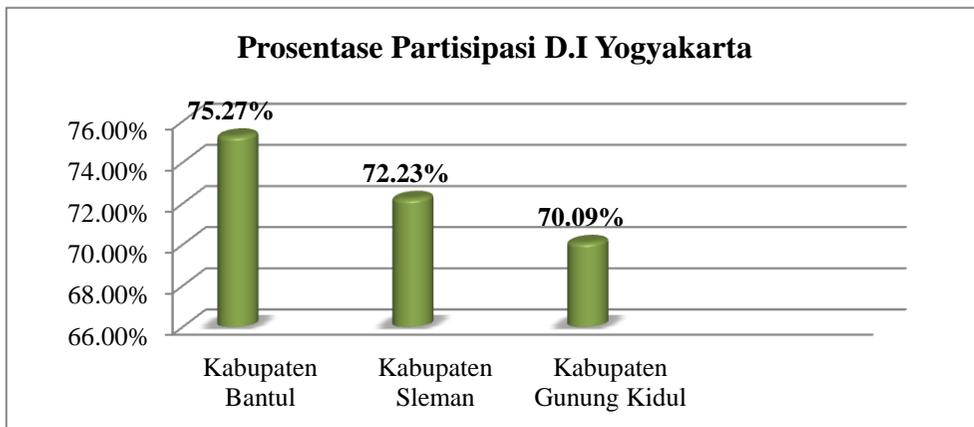
maksimal, partisipasi pemilih di pada pemilukada Kabupaten Bantul hanya mencapai 75,72%. Angka ini memang berada dibawah target yang ditentukan oleh KPU RI, namun angka partisipasi pemilih di Kabupaten Bantul ini telah berada diatas rata-rata angka partisipasi di level nasional.

Dibandingkan dengan pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2010, partisipasi pemilih mengalami peningkatan. Kondisi ini juga dialami oleh dua kabupaten lain yang mengikuti pemilukada tahun 2015 di DIY, yakni Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bantul juga menempati posisi tertinggi. Grafik presentasi partisipasi pemilih akan dijelaskan dalam grafik berikut

**Gambar 5.4. Grafik Partisipasi Pemilih**



*Sumber : KPU Kabupaten Bantul 2016*



*Sumber : KPU Kabupaten Bantul 2016*

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bantul berada di posisi tertinggi, yakni sejumlah 75,27%, sementara Kabupaten Gunung Kidul sejumlah 70,90% dan Kabupaten Sleman sejumlah 72,23%. Sama halnya dengan Pemilu pada tahun 2015, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bantul ini memiliki kenaikan sebesar 1,58% dari 73,69% pada pemilu pada tahun 2010 menjadi 75,27%.

Kenaikan tingkat partisipasi masyarakat ini disebabkan banyak faktor, salah satunya ialah keinginan masyarakat untuk membawa Bantul ke arah yang lebih baik dengan ikut serta dalam pemilu pada tahun 2015. Kondisi sosial, dan ekonomi, serta karakteristik kandidat pasangan calon dengan melihat visi misi juga menjadi salah satu alasan untuk mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk memilih.

Serta adanya kejenuhan yang dialami masyarakat dengan politik dinasti yang terjadi di Kabupaten Bantul. Kejenuhan yang dialami oleh masyarakat ini membuat

mereka berusaha menyalurkan hak memilihnya dengan turut serta menentukan pasangan yang memang dirasa mampu untuk membawa bantul kearah perubahan dalam 5 tahun mendatang. Tonggak perubahan sebuah daerah berada pada pemilu yang memilih kepala daerah, dan masyarakat sudah tidak mau salah pilih pemimpin lagi untuk Kabupaten Bantul.

Kejenuhan masyarakat ini diperkuat pula dengan pendapat Darwin (2016) dalam sesi wawancara di kantor DPC Partai Gerindra, yakni :

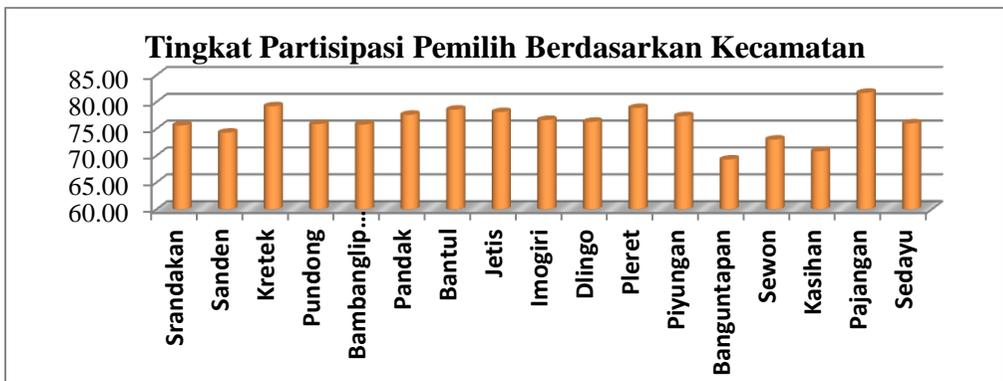
“masyarakat Bantul ini sekarang sudah tidak bodoh lagi, mereka sudah tau mana pemimpin yang bisa membawa perubahan, mana yang hanya memikirkan kepentingan pribadi. Mereka sudah jenuh dipimpin oleh orang-orang dari dinasti Samawi, jadi di pemilukada kali ini mereka berusaha memberikan hak memilihnya untuk dapat menentukan pemimpin terbaik” (Sekertaris DPC Gerindra Kabupaten Bantul, 8 November 2016)

Dari wawancara diatas dapat dikatakan bahwa kejenuhan masyarakat menjadi dasar utama tingginya partisipasi masyarakat di Kecamatan Bantul dalam pemilukada tahun 2015. Kondisi ini juga dirasakan sampai

level kecamatan, dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul, tingkat partisipasi di Kecamatan Pajangan menempati urutan tertinggi yakni di angka 81,69% dan tingkat partisipasi kecamatan banguntapan berada di urutan terendah yakni pada angka 69,72%.

Berikut tabel dan grafik tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Bantul per kecamatan pada tahun 2015

**Gambar 5.5. Grafik Partisipasi Pemilih per kecamatan**



*sumber : data KPU Kabupaten Bantul 2015*

**Tabel. 5.2. Tingkat Partisipasi Pemilih Per Kecamatan  
di Kabupaten Bantul tahun 2015**

NO	KEC	Jumlah seluruh pemilih (DPT+DPTb+DPPH+DPTb-2)	Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTb+DPPH+DPTb-2)	Tingkat Partisipasi
1	Srandakan	24142	18255	75,62%
2	Sanden	26095	19383	74,28%
3	Kretek	24084	19073	79,19%
4	Pundong	28392	21537	75,86%
5	Bambanglipuro	32031	24248	75,80%
6	Pandak	39918	30976	77,60%
7	Bantul	46749	36725	78,56%
8	Jetis	43292	33820	78,12%
9	Imogiri	47664	36531	76,64%
10	Dlingo	29965	22859	76,29%
11	Pleret	33684	26570	78,88%
12	Piyungan	36690	28337	77,34%
13	Banguntapan	76509	52994	69,27%
14	Sewon	72684	53042	72,98%
15	Kasih	73882	52305	70,80%
16	Pajangan	25817	21089	81,69%
17	Sedayu	34257	26033	75,99%
	Tingkat kabupaten	695855	523817	75,28%

*Sumber : KPU Kabupaten Bantul 2016*

Dari grafik dan tabel diatas dapat dilihat tingkat partisipasi masyarakat di kecamatan Banguntapan mendapatkan posisi terendah, hal ini disebabkan letak geografis kecamatan Banguntapan yang berada di perbatasan antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dan kecamatan ini terdiri dari 8 desa. Letak geografis dan

banyaknya desa tersebut dapat mempengaruhi bagaimana pola pemikiran masyarakat, masyarakat cenderung berfikir kearah modern dan tidak begitu memperdulikan keterlibatan mereka dalam pemilukada. Kondisi lain juga disebabkan karena jarak tempuh dari kecamatan Banguntapan dengan pusat pemerintahan di Bantul dirasa cukup jauh, jadi masyarakat cenderung memiliki partisipasi yang tergolong kurang aktif.

Berbeda halnya dengan Kecamatan Pajangan, tingkat partisipasi masyarakat di kecamatan ini mendapatkan posisi tertinggi diantara semua kecamatan yang ada di kabupaten Bantul. Kondisi ini dikarenakan letak geografis Kecamatan Pajangan yang jauh dari hiruk pikuk kota menyebabkan pola fikir masyarakatnya masih tergolong konvensional. Kecamatan Pajangan hanya terdiri dari 3 desa, dengan jumlah desa yang sedikit tersebut mempermudah pihak KPU dalam proses sosialisasi pentingnya partisipasi dalam pemilu, khususnya pemilukada.

Posisi Kecamatan Pajangan yang bersebelahan dengan pusat pemerintahan di Bantul juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingginya partisipasi masyarakat yang termasuk kategori aktif. Karena masyarakat tidak merasa kesulitan dalam memperoleh informasi seputar pemilu dan sangat mudah merasakan dampak dari pemilukada tersebut.

### **5.1.3. Modalitas**

Dalam pemenangan pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015 pasangan Suharsono-halim sudah memiliki modal awal yang cukup membantu kemenangan baik dari segi politik, sosial, dan budaya. Modal ini digunakan oleh koalisi partai politik untuk dapat meningkatkan kredibilitas dan citra dari pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati yang akan mereka usung.

Modal awal yang dimiliki oleh pasangan ini tergolong cukup banyak dan sangat berpengaruh. Adapun keseluruhan modal tersebut akan dijelaskan dalam masing-masing variabel berikut :

## **1. Modal Politik**

Modal politik merupakan salah satu aspek yang wajib dimiliki oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan mengikuti pemilihan. Cukup banyak kategori yang termasuk dalam bagian modal politik, jaringan, internal partai politik dan pemetaan isu politik merupakan beberapa dari sebagian modal politik yang ada.

Koalisi pasangan Suharsono-Halim agar dapat terpilih dalam pemilihan tahun 2015 di Kabupaten Bantul harus bisa melihat peluang politik maupun isu politik yang ada pada masyarakat setempat. Apakah peluang politik tersebut bisa diangkat menjadi isu yang nantinya akan dibawa saat proses kampanye, dimana hasil dari penyampaian program kampanye tersebut akan memberikan pengaruh bagi masyarakat untuk dapat memilih pasangan tersebut

Untuk mengetahui apakah modal politik dan peluang politik pada Pemilihan Kabupaten Bantul

tahun 2015 menjadi salah satu faktor kemenangan pasangan Suharsono-Halim. Berikut wawancara dengan pengurus-pengurus DPC partai politik pengusung pasangan Suharsono-Halim. Antara lain dengan Darwin sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bantul, menurutnya :

“Dinasti politik Samawi yang ada di Kabupaten bantul sudah berlangsung cukup lama. Selama 15 tahun masyarakat Bantul di pimpin oleh keluarga Samawi, dinamika politik yang terjadi di Bantul ini menjadi salah satu isu menarik yang kami angkat sebagai modal politik dalam pemenangan pemilu kemarin” (selasa, 8 November 2016)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bagaimana koalisi pasangan Suharsono-Halim mampu melihat peluang politik dari kejenuhan yang dirasakan oleh Masyarakat Bantul, dimana sudah terlalu lama Bantul dipimpin oleh Dinasti Samawi dan tidak ada perkembangan signifikan yang mereka rasakan. Peluang politik seperti ini tidaklah menjadi penghambat dalam kemenangan pasangan Suharsono-Halim, melainkan bisa menjadi modal utama dalam

program kampanye. Koalisi ini mengusung slogan PERUBAHAN dan adanya pola intelejen yang dibentuk oleh partai koalisi pasangan Suharsono-Halim mempermudah mereka dalam meraih kemenangan.

Selain itu modal politik yang dimiliki oleh pasangan Suharsono-Halim ialah adanya kekuatan dan jaringan dari koalisi partai politik pengusungnya. Partai politik pendukung pasangan Suharsono-Halim sangat berperan dalam upaya pemenangan pasangannya. Salah satunya dalam penyusunan program kampanye koalisi partai politik pengusung pasangan Suharsono-Halim membentuk tim-tim khusus yang bertugas untuk mengumpulkan atau mendata kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi dari kepemimpinan sebelumnya.

Kegiatan ini juga tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program kampanye. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam penyusunan

program kampanye tersebut dengan adanya pertemuan yang sering dilaksanakan oleh tim sukses koalisi kepada masyarakat dalam bentuk musyawarah, forum yang dibentuk oleh koalisi saat sosialisasi pasangan calon, maupun laporan-laporan yang diterima oleh PAC masing-masing partai.

**Gambar 5.6. Atribut koalisi Partai Politik Pendukung Pasangan Saat kampanye**



Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Darwin (2016) dalam sesi wawancara internal, yakni

“Masyarakat di Kabupaten Bantul itu cerdas, mereka tau mana program yang sudah berjalan mana yang belum, kami membentuk beberapa tim intelejensi untuk mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan, maupun keluhan masyarakat dari kepemimpinan sebelumnya. Hal ini menjadi bahan pertimbangan kami dalam menentukan program kampanye dan nantinya akan diteruskan menjadi program Bupati dan Wakil Bupati. Tidak

terlepas juga dari peranan PAC dan kader kami yang berada di lingkungan masyarakat.” (Sekertaris DPC Gerindra Kabupaten Bantul, 8 November 2016)

Penentuan program kampanye pasangan Suharsono-Halim tidak terlepas dari visi, misi dan tujuan dari partai politik. “Terwujudnya Masyarakat Bantul yang sehat, cerdas dan sejahtera berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” merupakan visi yang diangkat oleh pasangan ini, dengan 5 misi yang mengikuti visi tersebut menjadi bekal awal pasangan ini untuk membawa bantul ke arah perubahan.

Internal partai politik juga menjadi modal politik yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan pemilukada. Apabila sebuah partai politik mengalami perpecahan atau konflik maka kedepannya sudah pasti akan mempengaruhi strategi yang akan digunakan dalam koalisi partai tersebut. Salah satu contohnya dapat dilihat saat pemilukada Kabupaten

Bantul berlangsung, ialah adanya perpecahan dari internal partai pengusung lawan yakni PDI-P dimana dari 17 PAC yang dimiliki DPC Kabupaten Bantul, 14 PAC beralih mendukung pasangan Suharsono-Halim dengan membentuk relawan yang dinamakan Relawan Jas Merah.

Secara struktural memang mereka masih terdaftar dalam pendukung pasangan Ida-Munir, namun realitanya di lapangan kader PDIP tersebut malah memberikan dukungannya kepada pasangan Suharsono-Halim, kondisi ini membuat PDIP menjadi kehilangan sebagian besar suaranya dalam pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015.

Mereka juga menyatakan bahwa mereka selalu menjaga komunikasi antara sesama partai koalisi, untuk tetap menjaga komitmen bersama yang sudah ditetapkan dalam upaya perubahan di Kabupaten Bantul secara konstitusional. Keinginannya untuk serius mendukung pasangan tersebut, ia kemukakan dalam

sesi wawancara yang dilaksanakan oleh sebuah media cetak, yakni :

“Kita tidak boleh hanya larut dalam kesenangan sesaat atau kepentingan pribadi dan golongan yang bisa memecah belah kekompakan partai pengusung. Semangat perubahan juga tidak hanya soal ganti pemimpin, tapi perubahan yang mendasar terkait kebijakan pemerintah” minggu (14/2/2016)

## **2. Modal Sosial**

Berbicara soal modal sosial banyak aspek yang dapat dikategorikan sebagai modal sosial. Kredibilitas yang dimiliki pasangan calon, basis masa, serta ketokohnya dalam masyarakat merupakan salah satu contoh dari modal sosial. Aktivitas partai politik maupun kontestan individu yang telah dilaksanakan sebelumnya akan direkam dan ditanam dalam sistem ingatan individu maupun kolektif masyarakat.

Partai politik maupun kontestan individu tidak dapat lepas dari ingatan masa lalunya yang akan terus hidup dalam ingatan dan memori kolektif masyarakat, tindakan apapun yang dilakukan oleh partai politik

maupun kontestan di masa kini, nantinya akan dibandingkan dengan kredibilitas mereka di masa lalu.

Pada pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015 ini, kredibilitas yang dimiliki oleh pasangan Suharsono-Halim sangat berpengaruh terhadap kemenangan yang mereka raih. Suharsono memiliki citra politik dan citra sosial yang cukup baik di mata masyarakat Kabupaten Bantul, karena beliau adalah seorang purnawirawan polri yang sering mengadakan aksi sosial ataupun bantuan sosial kepada masyarakat Bantul jauh sebelum ia mencalonkan diri jadi calon Bupati.

Selain itu Suharsono juga merupakan sosok yang cukup ternama di kalangan warga Nahdatul Ulama (NU) di Kabupaten Bantul, dimana NU merupakan basis organisasi dan basis massa yang kuat. Kondisi ini juga di dukung oleh keanggotaannya dalam organisasi di NU, hampir seluruh keluarga dari Suharsono merupakan anggota NU. Dengan adanya

modal sosial ini mempermudah mereka untuk mendapatkan suara yang cukup banyak

Kondisi seperti ini juga dimiliki oleh calon wakil bupati yakni Ahmad Halim yang merupakan Ketua DPC PKB Kabupaten Bantul. Kredibilitasnya tidak perlu diragukan lagi. Halim pernah menjabat sebagai DPRD Provinsi DIY serta merupakan tokoh masyarakat di yang tergabung di dalam organisasi NU Kabupaten Bantul. Hal ini dibuktikan dengan kemenangan tertinggi di raih di Kecamatan Sewon dengan jumlah suara 21.600 suara sah yang merupakan pusat basis masa NU di Kabupaten Bantul. Konsistensi menjaga image politik ini juga ditegaskan oleh Darwin (2016) yakni :

“Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang kami usung memiliki kredibilitas yang sangat tinggi, sebelum pencalonan ini berlangsung beliau sudah sangat dekat dengan masyarakat Bantul, khususnya masyarakat Kecamatan Sewon. Pak Suharsono selalu memberikan bantuan dana kepada masyarakat Bantul, selain itu beliau selalu aktif dalam acara-acara di masyarakat. Sama seperti pak Halim, karena beliau anggota NU dan Ketua DPC

PKB Kabupaten Bantul, beliau sudah sangat dikenal oleh masyarakat Kabupaten Bantul.

**Gambar 5.7. Kunjungan Suharsono ke Warga Bantul**



Tidak hanya itu, modal sosial yang dimiliki oleh Suharsono-Halim juga dibantu langsung oleh koalisi partai politik pengusung maupun pendukungnya. Salah satu caranya ialah dengan membentuk sebuah tim yang berfungsi untuk mencari dan mengumpulkan data-data tentang masyarakat yang mengalami musibah meninggal dunia. Setelah data tersebut terkumpul, maka hampir setiap hari Suharsono datang ke daerah tersebut untuk turut berbela sungkawa

Kondisi ini dipertegas dengan pendapat Darwin (2016) dalam wawancara, yakni :

“kami memiliki cara sendiri untuk memenangkan pemilukada kabupaten Bantul ini. Kami melakukan cara yang tidak umum seperti mencari data tentang masyarakat Bantul yang sedang mengalami musibah meninggal dunia. Data tersebut kami kumpulkan dan kami serahkan kepada pak Suharsono, jadi setiap hari pasti beliau beserta pak Halim mengunjungi masyarakat Bantul yang mengalami musibah tersebut.

Modal sosial yang dibentuk seperti ini sangat memberi kesan kepada masyarakat. Selain memang sudah terkenal di kalangan warga Bantul, Suharsono-Halim juga memanfaatkan relasi dan kerabatnya untuk membentuk citra baik dengan harapan dapat memenangkan suara terbanyak dalam pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015. Ia juga sering mengadakan pertemuan-pertemuan dengan warga hanya untuk mengetahui bagaimana keluhan dan permintaan warga, mendengarkan aspirasi warga untuk membangun Bantul menuju perubahan.

### **3. Modal Budaya**

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa modal budaya lahir secara otomatis dalam diri seseorang.

Budaya dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan tempat tinggal, serta pendidikan yang dimiliki. Suharsono-Halim merupakan sosok pasangan putra daerah, ia sudah sangat akrab dengan budaya Jawa yang dari lahir ia terima.

Suharsono merupakan seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) yang cukup lama bertugas di Banten, dan ia juga pernah bertugas di Mabes Polri. Pendidikan militer yang dimilikinya merupakan salah satu modal politik yang cukup membantu peningkatan kredibilitasnya saat pemilu. Hal ini juga disampaikan oleh Nur Rohmat (2016) saat diwawancarai di kantor DPRD

“Pak Suharsono itu seorang purnawirawan Polri, ia pernah bertugas lama di Banten. Pendidikan militer yang dimiliki beliau sangat membantu mendongkrak kredibilitas yang dimilikinya. Secara otomatis seseorang yang memiliki pendidikan militer jauh lebih bisa dipercaya untuk menjabat dalam kursi kepemimpinan, kondisi ini dikarenakan pendidikan yang dilakukan oleh orang-orang militer sangat jauh berbeda dengan pendidikan yang diterima oleh masyarakat sipil, mereka cenderung lebih disiplin, tegas dan tidak

mudah dipengaruhi oleh orang lain” (Ketua DPC PKB Kabupaten Bantul, 29 November 2016)

Modal budaya lain yang dimiliki oleh pasangan Suharsono-Halim didapatkan dari gelarnya di organisasi Nahdatul Ulama (NU). Kedudukan yang dimiliki oleh Halim dalam organisasi NU di Kabupaten Bantul cukup tinggi, ia merupakan salah satu pengurus organisasi NU di Bantul. Dengan jabatan yang dimiliki olehnya di NU, suara dalam pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015 yang lalu hampir rata-rata didominasi oleh kalangan muda di kecamatan Sewon.

Kemenangan tertinggi yang diraih di kecamatan Sewon tersebut dikarenakan Suharsono dan Halim memberikan sosialisasi ke pondok-pondok pesantren yang berlokasi di kecamatan tersebut. Tidak hanya itu adanya Satgas Garda Bangsa yang merupakan organisasi pemuda PKB yang paling depan juga

membantu pasangan ini dalam upaya pemenangan pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015.

Modal budaya dari keluarga juga sangat berpengaruh terhadap pemenangan hasil pemilu, masyarakat juga akan melihat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati melalui keluarganya. Apabila keluarga pasangan calon tersebut terpandang maka secara otomatis figur calon akan meningkat, begitu sebaliknya apabila keluarga sudah memiliki citra buruk di mata masyarakat, maka secara otomatis masyarakat akan menganggap hal yang sama kepada pasangan calon.

Hal ini yang dialami oleh pasangan Suharsono-Halim, dimana keluarga pasangan ini merupakan keluarga yang cukup terpandang di Kabupaten Bantul. Dapat dibuktikan dengan seringnya keluarga pasangan calon ini mengadakan pengajian di kediamannya, sehingga masyarakat atau kaum muda yang mengikuti pengajian tersebut sudah mengenal

secara baik bagaimana keluarga yang dimiliki oleh pasangan Suharsono-Halim, dan menjadi bahan pertimbangan mereka untuk memilih pasangan ini. Kondisi ini juga dikemukakan oleh Subhan Nawawi (2016) yakni :

“pasangan yang kami usung ini dari keluarga yang baik-baik dan cukup terpandang di kalangan masyarakat Bantul, banyak masyarakat yang sering mengikuti pengajian di kediaman pak Suharsono. Tidak hanya itu kedudukan pak Halim dalam organisasi NU juga dapat berpengaruh, karena beliau sering dianggap ustad atau pemuka agama di dalam lingkungan masyarakat Bantul. Hal ini menjadi modal kami dalam memenangkan pemilukada 2015.

Modal budaya yang dimiliki oleh pasangan Suharsono-Halim juga dapat dikatakan berpengaruh dalam kemenangan yang diraih oleh pasangan ini pada pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015 kemarin.

#### **4. Modal Ekonomi**

Setiap pasangan calon sudah pasti akan mempersiapkan modal ekonomi atau finansial saat ingin terjun dalam dunia Politik. Modal ekonomi ini

lebih menekankan pada bagian dana politik, pada umumnya modal ekonomi digunakan untuk memenuhi kebutuhan politik saat pemilu-kada berlangsung, dimulai dari awal pendaftaran sampai proses pemungutan suara.

Berdasarkan undang-undang No 8 Tahun 2015 yang kemudian diturunkan kedalam PKPU nomor 7 tahun 2015 tentang kampanye, telah secara jelas mengatur tentang kewajiban KPU untuk memberikan fasilitas kampanye dalam bentuk pembuatan dan pemasangan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) dengan jumlah tertentu.

Dalam pelaksanaannya jumlah APK yang terbatas tersebut membuat proses pemilu-kada Kabupaten Bantul tahun 2015 menjadi berbeda dengan yang sebelumnya. Keterbatasan APK yang dimiliki oleh KPU menjadikan lingkup pemilihan menjadi kecil, yang dikhawatirkan akan mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih.

Peraturan tentang pemeliharaan APK yang hanya dibebankan kepada KPU Kabupaten menjadi permasalahan sendiri terkait daya tahan APK itu sendiri, dengan kata lain permasalahan ini berkaitan erat dengan ketersediaan anggaran dalam melakukan fasilitasi.

KPU Kabupaten Bantul memfasilitasi/mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye (APK) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.3. Jenis Alat Peraga Kampanye  
KPU Kabupaten Bantul**

No	Jenis APK	Jumlah	Keterangan
1	Baliho Ukuran : 2 m x 3 m	5 buah tiap paslon	Dipasang di wilayah kabupaten
2	Umbul-umbul Ukuran : 1,15 m x 5 m	10 buah tiap paslon	Dipasang di wilayah Kecamatan
3	Spanduk Ukuran : 60 cm x 5 m	2 buah tiap paslon	Dipasang di wilayah Desa/Kelurahan

*Sumber : data KPU Kabupaten Bantul*

Bahan kampanye tersebut sudah meliputi semua benda atau bentuk lain yang memuat visi-misi, program pasangan calon, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye meliputi

selebaran (flyer), brosur (leaflet), pamflet dan poster. Desain dan materi bahan kampanye dibuat sendiri oleh pasangan calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten Bantul.

Selain visi-misi dan serta tanda gambar/foto pasangan calon, materi juga dapat menampilkan tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik (koalisi), atau foto pengurus partai politik atau gabungan partai politik (koalisi). KPU Kabupaten Bantul mencetak Bahan kampanye dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.4. Bahan Kampanye KPU Kabupaten Bantul**

<b>No</b>	<b>Jenis Bahan Kampanye</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Poster Ukuran : 40 cm x 60 cm	5.851 x 3 lembar = 17.553 lembar untuk setiap paslon	
2	Flayer / selebaran Ukuran : 8,5 cm x 21 cm	5.851 x 15 lembar = 87. 765 lembar untuk setiap paslon	
3	Brosur / leaflet Ukuran : 30 cm x 21 cm	5.851 x 10 lembar = 58.510 lembar untuk setiap paslon	

*Sumber : data KPU Kabupaten Bantul*

**Gambar 5.8. Pemasangan Spanduk di Pertigaan Jetak, Ringinharjo, Bantul**



KPU kabupaten Bantul tidak hanya menyediakan Alat Bantu Kampanye (APK) dan bahan kampanye saja, melainkan menyediakan fasilitas lain yakni, Debat Publik atau Debat Terbuka, Debat Publik Putaran I, Debat Publik Putaran II, Debat Publik Putaran III, serta iklan di media massa cetak dan/atau media elektronik, juga iklan kampanye di radio.

Dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh KPU tersebut, modal ekonomi yang awalnya di gunakan oleh pasangan calon untuk memenuhi kebutuhan kampanye sedikit lebih berkurang. Pasangan calon Bupati dan Wakil bupati serta koalisi pasrtai politik

yang mengusung tetap mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk pelaksanaan pemilukada. Seperti yang di kemukakan oleh Darwin (2016) yakni :

“ kami sedikit terbantu dengan adanya regulasi terkait penyediaan fasilitas kampanye dari pihak KPU, namun apabila hanya mengandalkan fasilitas dari KPU maka masih dikatakan jauh dari kata cukup, kami butuh media yang lebih luas. Semua sudah dianggarkan dengan jelas, dan setelah dihitung secara keseluruhan modal ekonomi yang kami gunakan saat pemilukada tahun 2015 kemarin sejumlah 5 milyar. Itu sudah total dari kedua partai”

Kondisi yang sama juga di kemukakan oleh Subhan Nawawi (2016) saat ditanya seputar dana kampanye , ia menyatakan :

“ untuk nominal pastinya saya tidak mengetahui lebih jelas, karena ada tim yang melakukan penghitungan, tapi yang saya ketahui dana tersebut cukup besar. Dana tersebut di dapatkan dari dana partai, dana pasangan calon dan dari sukarelawan” (wakil DPC kabupaten Bantul sekaligus anggota DPRD, 17 November 2016)

Kegiatan lain yang di fasilitasi oleh KPU Kabupaten Bantul ialah pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialogis serta rapat umum yang tetap harus beri jadwal yang sesuai oleh KPU

Kabupaten Bantul agar tidak ada kesalah pahaman atau jadwal yang bertabrakan antara masing-masing pendukung pasangan calon.

Tidak semua kegiatan atau bahan kampanye di fasilitasi oleh KPU Kabupaten Bantul, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh pasangan calon dan/atau tim suksesnya. Bahan kampanye pendukung yang dipersiapkan oleh tim sukses pasangan ini berupa stiker, kaos serta adanya fasilitas makanan yang diberikan kepada partisipan saat kampanye berlangsung.

Namun pihak tim pemenangan pasangan Suharsono-Halim menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada politik uang maupun broker serta preman politik yang di libatkan dalam pemenangan pasangan Suharsono-Halim dalam pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015.

## **5.2. Temuan di Lapangan**

### **5.2.1. Perpecahan di Kubu Lawan**

Berbicara tentang pemilukada di sebuah daerah, sudah pasti tidak akan pernah terlepas dari konflik yang di temui. Baik konflik antara partai politik dan pendukung saat kampanye berlangsung maupun dari internal partai politik itu sendiri. Kabupaten Bantul dalam pelaksanaannya juga tidak terlepas dari konflik yang terjadi, konflik ini dapat ditemui saat pelaksanaan kampanye berlangsung dan terjadi didalam internal partai politik.

Konflik ini diawali dengan adanya pembelokan dukungan dari PAC yang dimiliki oleh PDIP mendukung pasangan lawan yakni Suharsono-Halim bukan mendukung pasangan calon yang diusungnya, yakni Ida-Munir. Dari 17 PAC yang dimiliki oleh PDIP, 14 PAC sepakat membelokkan dukungan kepada Suharsono-Halim dan membentuk relawan yang dinamakan relawan perubahan. Dampak yang ditimbulkan dari pembelokan

suara ini ialah dengan adanya isu pemecatan seluruh PAC yang berbelok tersebut saat pemilukada berlangsung.

Selain itu adanya kerusuhan yang terjadi saat kampanye pasangan Ida-Munir berlangsung, mengakibatkan adanya korban kekerasan yang harus dibawa kerumah sakit. Kerusuhan tersebut terjadi karena adanya simpatisan PPP yang datang saat kampanye Ida-Munir berlangsung, pihak PDIP yang memang tidak pernah berdampingan dengan PPP merasa kaget kenapa ada elit politik dan simpatisan dari pihak PPP yang datang saat kampanye berlangsung. Kehadiran pihak PPP ini yang menyebabkan tersulutnya amarah simpatisan PDIP sehingga menyebabkan adanya tindakan kekerasan berupa penggunaan senjata tajam dan pembakaran sepeda motor.

Simpatisan PDIP tidak mengetahui kalau elit politik dari PDIP meminta dukungan kepada sebagian elit politik PPP dan sebagian simpatisan dari PPP untuk memperoleh suara dalam pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015. Kekerasan yang terjadi ini menimpa salah satu elit politik

partai PPP dan mengalami luka di bagian kepala dan langsung dibawa kerumah sakit oleh masyarakat setempat dan kekerasan ini langsung di tangani oleh pihak yang berwajib.

Kekerasan yang terjadi saat kampanye pasangan Ida-Munir ini berlangsung disaksikan oleh masyarakat umum, dengan adanya kondisi ini menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat Bantul untuk memberikan suaranya kepada Pasangan koalisi Ida-Munir pada pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015 dan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Masyarakat Bantul yang mengetahui adanya konflik yang terjadi saat kampanye ini, cenderung akan mengalihkan suara kepada pasangan Suharsono-Halim.

Konflik yang terjadi di kubu lawan yakni PDIP ini menjadi salah satu modal politik yang dimiliki oleh pasangan Suharsono-Halim. Adanya perpecahan dari kubu lawan yang beralih mendukung Suharsono-Halim, membuat anggota koalisi partai politik mengalihkan basis

suara ke 14 PAC tersebut kepada pasangan calon nomor urut 1 yakni Suharsono-Halim.

Selain dari modal politik yang berpengaruh terhadap kondisi ini, modal sosial juga turut serta berpengaruh terhadap perpecahan di kubu lawan. Hal ini disebabkan karena kepercayaan masyarakat terhadap pasangan lawan menjadi berkurang karena adanya kekerasan yang terjadi saat pelaksanaan kampanye, dimana masyarakat melihat dan menilai secara langsung bagaimana kekerasan tersebut terjadi.

Melemahnya kondisi sosial dan citra partai yang terjadi di kubu Ida-Munir, koalisi pasangan Suharsono-Halim dengan cepat mengalihkan suara masyarakat untuk memilih pasangan yang memiliki citra baik, dan anggota koalisi partai juga berusaha konsisten untuk menjaga citra dari pasangan yang mereka usung. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap modal budaya dan modal ekonomi, koalisi pasangan Suharsono-Halim tidak perlu mengeluarkan uang yang cukup besar untuk membeli

suara masyarakat, dengan adanya konflik di kubu lawan secara otomatis masyarakat akan beralih memilihnya.

Begitu pula dengan modal budaya, dengan adanya tindakan kekerasan yang terjadi di kubu lawan saat kampanye berlangsung dan adanya perpecahan di kubu lawan yang berakhir dengan isu pemecatan 14 PAC yang mendukung pasangan Suharsono-Halim, masyarakat dapat menyimpulkan bahwa sikap yang dimiliki oleh pasangan lawan cenderung menunjukkan bahwa gaya kepemimpinannya bersifat otoriter. Hal ini bisa menjadi modal budaya dari pasangan Suharsono-Halim kedepannya untuk dapat mengumpulkan suara terbanyak pada pemilukada Kabupaten bantul tahun 2015.

Kondisi ini diperkuat dengan pernyataan Darwin (2016) dalam pelaksanaan wawancara di DPD Partai Gerindra, yakni :

“pada dasarnya kemenangan pasangan Suharsono-Halim itu sudah bisa di prediksi awalnya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi ke 14 PAC tersebut beralih mendukung tim hijau, salah satunya disebabkan karena mereka merasa kepemimpinan Ida dan Idham Samawi di PDIP itu terlalu keras dan

cenderung otoriter, atau bisa disebut juga dengan sosok tangan besi. Kekerasan yang terjadi saat pelaksanaan kampanye pasangan Ida-Munir sedikit banyaknya menguntungkan dari pihak kami, dimana kondisi itu menjadi modal dari segi politik, budaya, ekonomi dan sosial bagi kami selaku partai koalisi untuk maju dan melawan petahana. Adanya permasalahan ini dapat mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihannya, masyarakat sudah tidak perlu banyak diberi janji-janji kosong, cukup dengan adanya konflik ini membuat basis kepercayaan masyarakat terhadap pasangan lawan berkurang”. (Sekertaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bantul, 08 November 2016)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa perpecahan di kubu lawan yakni Ida-Munir secara garis besar mempengaruhi kemenangan pihak Suharsono-Halim pada pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015. Korelasi antara temuan di lapangan dengan teori yang digunakan oleh peneliti akan disampaikan dalam tabel berikut :

**Tabel 5.5. Tabel Korelasi Temuan dengan Teori**

No	Teori	Temuan
1	Koalisi Partai Politik	Koalisi Surahsono-Halim mendapatkan tambahan dukungan dari 14 PAC PDIP yang membentuk Relawan Jas Merah
2	Partisipasi Masyarakat	Partisipasi masyarakat berkurang karena adanya kekerasan yang terjadi saat kampanye pasangan Ida-Munir berlangsung
3	Modal Politik	Adanya pembelokan dukungan dari 14 PAC PDIP dan kekerasan di pelaksanaan kampanye dimanfaatkan oleh koalisi partai politik untuk mencari dukungan masyarakat.
4	Modal Sosial	Masyarakat yang melihat dan menilai secara langsung kekerasan yang terjadi saat kampanye menyebabkan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lawan.
5	Modal Ekonomi	Adanya relawan yang bergabung dalam koalisi Suharsono-Halim, membantu kontribusi dalam modal ekonomi yakni dana partai. Adanya konflik yang terjadi di kubu lawan, menyebabkan masyarakat lebih mudah memilih tanpa harus dibeli suaranya atau melakukan politik uang.
6	Modal Budaya	Kepemimpinan yang kaku dan cenderung otoriter menjadi salah satu modal dalam perolehan suara. Adanya pembelokan dukungan dari 14 PAC juga disebabkan oleh model kepemimpinan ini.

### **5.2.2. Isu Politik yang Diusung Pasangan**

Isu politik yang diangkat oleh pasangan Suharsono-Halim dapat dikategorikan dalam isu sederhana namun berpengaruh besar terhadap kemenangannya. Isu tersebut ialah PERUBAHAN dimana baik koalisi partai politik pendukung maupun dari calon Bupati dan Wakil Bupati yakni Suharsono-Halim memiliki tekad yang kuat untuk melakukan perubahan di Kabupaten Bantul.

Perubahan tersebut didasari karena adanya kejenuhan dari masyarakat terhadap kepemimpinan sebelumnya, dan pemerintahan di Kabupaten Bantul tidak mengalami perkembangan signifikan karena adanya dinasti politik yang terjadi di pemerintahan. Koalisi partai pengusung serta pasangan calon mengusung isu perubahan dengan tujuan memberikan kesejahteraan umum kepada masyarakat lebih baik.

Isu perubahan yang di usung pasangan Suharsono-Halim ini dirasa cukup sesuai dengan kondisi dan harapan yang ada di masyarakat. Koalisi ini kedepannya

menginginkan adanya transparansi yang dikontrol secara langsung oleh masyarakat untuk mencegah adanya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam sektor pemerintahan, juga terfokus pada pengelolaan program kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Bantul.

Koalisi partai politik pengusung pasangan Suharsono-Halim memiliki tekad untuk menjadi partai pendukung pengawalan terhadap kepala daerah dan pemerintahan yang terpilih kedepannya. Kondisi ini juga diperkuat dengan adanya pendapat dari Darwin (2016) dalam sesi wawancara, yakni:

“kami mengusung isu perubahan bukan hanya sekedar isu, kami serius dan berusaha semaksimal mungkin agar isu tersebut memang bisa membuktikan adanya perubahan di Kabupaten Bantul. Adanya unsur kejenuhan yang dialami masyarakat terhadap model kepemimpinan dinasti politik ditambah dengan perkembangan Kabupaten Bantul yang kurang signifikan membuat kami benar-benar harus kerja keras untuk melakukan perubahan. Banyak masyarakat yang juga menginginkan hal tersebut saat kami melaksanakan pertemuan dengan masyarakat. Banyaknya kasus pungli dan korupsi yang terjadi pada kepemimpinan sebelumnya semakin menguatkan kami untuk melakukan perubahan di Kabupaten Bantul agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berfokus pada kepentingan masyarakat”.

(Sekertaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bantul,  
08 November 2016)

Kondisi ini di dukung pula dengan pendapat masyarakat, saat ditanya tentang harapan mereka untuk Kabupaten Bantul dan pilihan mereka akan diberikan kepada siapa, masyarakat tersebut dengan sederhana menyampakan pendapatnya dalam bahasa jawa yakni “*sing penting berubah*” yang artinya “yang penting bisa berubah”. Kondisi ini dimanfaatkan langsung oleh koalisi pasangan Suharsono-Halim untuk mengakomodir suara masyarakat untuk memilih pasangan nomor urut 1.

Keadaan masyarakat yang menginginkan adanya perubahan kearah yang lebih baik di Kabupaten Bantul menjadi salah satu modal sosial yang dimiliki oleh pasangan Suharsono-Halim. Isu perubahan yang diusung oleh koalisi ini juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih pasangan Suharsono-Halim, karena masyarakat percaya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ini dapat membawa Bantul ke arah perubahan.

Selain itu modal ekonomi dan budaya juga berpengaruh terhadap isu politik yang diusung pasangan Suharsono-Halim. Modal ekonomi ini di dapatkan dari relawan yang membantu dalam proses pemenangan, mereka yakin Suharsono-Halim benar-benar dapat melakukan perubahan yang signifikan di Kabupaten Bantul. Selain itu budaya dinasti politik yang ada di Kabupaten Bantul secara otomatis akan berhenti dan diganti dengan budaya kepemimpinan yang berfokus pada kepentingan rakyat dan berfokus pula pada upaya perubahan dalam tata kelola pemerintahan.

Korelasi antara faktor Isu politik yang diusung oleh koalisi Pasangan Suharsono-Halim dengan teori yang digunakan akan dijelaskan dalam tabel berikut :

**Tabel 5.6. Tabel Korelasi faktor Isu Politik dengan Teori**

<b>No</b>	<b>Teori</b>	<b>Temuan</b>
1	Koalisi Partai Politik	Koalisi Surahsono-Halim bertujuan untuk memberikan kesejahteraan umum untuk masyarakat
2	Partisipasi Masyarakat	Partisipasi masyarakat meningkat dengan adanya isu perubahan yang diusung oleh pasangan Suharsono-Halim
3	Modal Politik	Adanya pembelokan dukungan dari 14 PAC PDIP dan kekerasan di pelaksanaan kampanye dimanfaatkan oleh koalisi partai politik untuk mencari dukungan masyarakat.
4	Modal Sosial	Tingginya tingkat kejenuhan yang dialami masyarakat terhadap dinasti politik di Kabupaten Bantul, dan mayoritas masyarakat Bantul menginginkan perubahan.
5	Modal Ekonomi	Dalam segi modal ekonomi atau pemberian dana politik, isu perubahan menjadi isu yang menarik relawan untuk membantu dalam segi pendanaan.
6	Modal Budaya	Dinasti politik yang terjadi di Kabupaten Bantul dapat digantikan dengan budaya kepemimpinan yang lebih memfokuskan kepada masyarakat dan tata kelola pemerintahan